

Negara yang sebenarnya mengandung unsure ‘bersalah’ dan ‘jahat’ menjadi sebuah Negara yang seakan – akan tidak bersalah bahkan Nampak lebih merupakan Negara yang memiliki solidaritas social internasional.

Namun demikian, bagaimanapun, hasil persetujuan pampasan perang ini cukup memuaskan kedua belah pihak pada saat itu sehingga proses ratifikasinya cukup lancar. Persetujuan ini juga membuka babak baru hubungan akrab Republik Indonesia – Jepang. Akhirnya, hasil persetujuan pampasan perang ini dipertukarkan di Tokyo pada tanggal 15 April 1958 yang sekaligus membuka hubungan diplomatic Republik Indonesia – Jepang secara resmi¹⁸.

BAB III

HUBUNGAN REPUBLI INDONESIA – JEPANG

1958 – 1966

Hubungan diplomatic Indonesia – Jepang secara resmi dimulai pada tanggal 15 April 1958, sesaat setelah hasil persetujuan perjanjian perdamaian dan perjanjian pampasan perang dipertukarkan di Tokyo. Berdasarkan perjanjian perdamaian dan perjanjian pampasan perang inilah Indonesia dan Jepang menjalin hubungan, masing – masing Nampak berhati – hati mengingat situasi internasional dan kondisi dalam negeri masing – masing Negara meletakkan mereka pada kepentingan yang berbeda dan dalam posisi yang kurang menguntungkan.

Sejak menghadapi para pemberontak pada awal tahun 1958, Indonesia menuduh Amerika Serikat membantu para pemberontak, hubungan Indonesia – Amerika Serikat menjadi tegang dan kepercayaan Indonesia kepada Amerika Serikat menjadi berkurang, padahal Amerika Serikat merupakan pelindung utama dan sahabat Jepang yang paling mengikat. Para pemberontak dapat ditaklukkan dalam waktu yang sangat singkat dengan bantuan persenjataan dari Polandia dan Chekoslowakia, blok Uni Soviet.

Kegagalan perundingan Indonesia – Belanda dalam masalah pemindahan kekuasaan Irian Barat ke Indonesia dan kegagalan Indonesia memperoleh dukungan dua

¹⁸ Teks Perjanjian Perdamaian dan Perjanjian Pampasan Perang dapat dilihat pada Pewartu Kemlu, No. 1 Tahun ke IV, Januari 1958.

pertiga suara di PBB menjadikan Indonesia bertekad untuk merebut Irian Barat dengan cara kekerasan. Dalam hal ini Indonesia memperoleh bantuan dari Uni Soviet sejumlah kredit yang diwujudkan dalam peralatan senjata dan peralatan perang lainnya. Namun, sebelum serangan umum lebih luas terjadi, telah ditandatangani persetujuan New York pada tahun 1962 antara Belanda dan Indonesia yang mengakhiri masalah Irian Barat dengan diserahkannya Irian Barat kepada PBB untuk kemudian pada tanggal 1 Mei 1963 PBB menyerahkan kepada pemerintah Indonesia.

Pembebasan Irian barat telah berhasil berkat kekuatan terpadu antara militer dan diplomasi. Namun, tak terduga Indonesia telah memulai krisis internasional baru menentang pembentukan federasi Malaysia yang disponsori oleh Inggris. Sesuai dengan politik Nefos – Oldefos, Presiden Sukarno melancarkan kampanye ‘ganyang Malaysia’. Dalam masalah ini Uni Soviet mulai kurang tertarik pada Indonesia, karena dalam sengketa China – Soviet Indonesia lebih condong kepada China. Baik Amerika Serikat maupun Jepang menganggap China sebagai musuh potensial pada waktu itu, dalam suasana perang dingin, sebelum masalah Malaysia terselesaikan, menyusul kudeta yang dilancarkan oleh beberapa perwira yang didukung dan didalangi oleh partai Komunis Indonesia (PKI) pada tanggal 30 September 1965. Kudeta ini berakhir dengan kegagalan.

Walaupun kudeta gagal, namun situasi politik dalam negeri menjadi kacau tidak menentu. Terjadi dualism kepemimpinan antara Presiden Sukarno dan Mayor Jendral Suharto. Dalam waktu satu semester dualism kepemimpinan telah berakhir secara defacto, dengan ditandatanganinya surat perintah yang berisi perintah untuk mengambil tindakan yang perlu untuk menyelamatkan revolusi, oleh Presiden Sukarno kepada Mayor Jendral Suharto pada tanggal 11 Maret 1966. Walaupun pada waktu terjadi kudeta yang gagal dan pada saat dualism Jepang menyatakan tetap mendukung Presiden Sukarno, namun tidak mengadakan reaksi apapun terhadap kejatuhan Presiden Sukarno yang semakin nyata kecuali tetap memelihara hubungan baik.

Sementara itu, Jepang sejak diberi kemerdekaan pada tanggal 28 April 1952, praktis tidak mengalami pergolakan dalam negeri yang berarti. Sejak Perdana Menteri Yoshida Shigeru sampai Perdana Menteri Sato Eisaku politik luar negeri Jepang mengikuti pola Amerika Serikat, walaupun terdapat keinginan untuk tidak tergantung sama sekali,

dalam 'containment policy'. Keamanannya yang cukup terjamin di bawah payung Amerika Serikat, menjadikan Jepang mampu memusatkan perhatiannya pada bidang ekonomi. Kemajuan ekonomi Jepang yang menakjubkan selama dua dasa warsa setelah pendudukan Amerika, membuktikan hal itu.

Politik luar negeri Jepang terhadap Negara – Negara tetangganya, termasuk Asia Tenggara, ditekankan pada usaha memperoleh bahan baku dan pasar bagi industrinya yang terkenal dengan 'diplomasi ekonomi' dan 'kerja sama ekonomi'. Hubungan Indonesia – Jepang, bagi Jepang, tidak lain dalam rangka pertumbuhan ekonominya. Oleh karena itu tidak terlalu melihat atau menekankan pada pengaruh perbedaan ideology. Menurut teori 'Nefos – Oldefos', Jepang lebih dekat dengan Oldefos sedangkan Indonesia berada pada Nefos, namun hubungan Indonesia – Jepang relative baik dan bersahabat.

Dalam bab ini selanjutnya berturut – turut, akan dibahas posisi Indonesia maupun Jepang dalam Politik internasional, dan hubungan Republik Indonesia – Jepang pada periode 1958 – 1966.

III.1. Indonesia dan Jepang dalam Politik Internasional

III.1.1. Indonesia

Sejak tahun 1950-an sampai dengan tahun 1960an, politik luar negeri Indonesia 'bebas aktif' benar – benar teruji. Pada awal tahun 1950an, politik luar negeri Indonesia diwarnai oleh dua kekuatan yang berlawanan arah kecenderungan. Cabinet yang dikuasai oleh PNI lebih menginginkan bersahabat dengan China Komunis, sedangkan cabinet yang dikuasai Masjumi lebih menginginkan bersahabat dengan Barat. Bagaimanapun, semua cabinet mengusahakan politik netralisme antara blok Komunis dan Barat. Pada tahun 1950, Indonesia mengakui pemerintah China Komunis, dan Peking menyelenggarakan misi diplomatic yang giat di Jakarta, yang terutama aktif dalam lapangan hubungan kebudayaan. Banyak orang China Indonesia pergi ke Peking untuk belajar atau kunjungan – kunjungan kebudayaan. Pengaruh China komunis juga dirasakan pada sekolah – sekolah China di Indonesia. Kepada Amerika Serikat, Indonesia menghadapinya dengan hati – hati, menolak bantuan ekonomi Amerika jika hal itu dimaksudkan untuk mendudukan Indonesia pada posisi anti – Komunis. Peranan Indonesia sebagai salah satu Negara netral dibuktikan ketika berlangsung konferensi Asia – Afrika yang netral, Negara – Negara pro – Barat dan

Negara – Negara Komunis diundang, yang diselenggarakan pada bulan April 1955 di Bandung, satu tempat yang dapat diterima oleh semua pengikut konferensi.

Pemilihan umum pertama, sejak kemerdekaan, diselenggarakan pada bulan September 1955 di bawah Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masjumi. Hasil pemilu, muncul empat partai besar. Dua yang paling besar adalah PNI dan Masjumi yang hampir menunjukkan kekuatan yang sama. Dua partai kuat yang lain adalah Nahdlatul Ulama dan Partai Komunis¹⁹. Dari hasil pemilu ini tidak dapat dipastikan apakah Indonesia akan lebih dekat kepada blok Komunis atau kepada blok Barat.

Pemilu yang diharapkan akan mewujudkan stabilitas politik dan kelangsungan pembangunan, ternyata malahan menimbulkan konflik nasional yang gawat. Ketidakompakan terus berlanjut, situasi ekonomi tetap kritis, bahkan lebih parah. Ketidakmampuan pemerintah di bawah sistem parlementer memecahkan masalah persatuan dan pembangunan ekonomi menjadikan Presiden Sukarno ingin meninggalkan demokrasi Barat dan mengenalkan ‘demokrasi terpimpin’ nya. Kekacauan dalam negeri meluas, konflik antara pemerintah, partai politik dan militer dan juga konflik di dalam masing – masingnya. Konflik yang paling mengancam persatuan dan kesatuan adalah ketidakpuasan daerah – daerah luar pulau Jawa, baik karena distribusi anggaran pembangunan yang dianggap tidak adil maupun masalah etnik, menjadi tantangan terbuka dengan proklamasi pembentukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) pada tanggal 15 Februari 1958 oleh Syafrudin Prawiranegara, Masjumi, di Padang Sumatera Barat.

Hubungan antara Jakarta dan Washington semakin memburuk, karena Presiden Sukarno menuduh Amerika Serikat membantu kaum pemberontak dengan diam – diam. Presiden Sukarno kemudian mengungkapkan bahwa duta besar Amerika Serikat pada waktu itu, Howard Palfrey Jones tidak dapat menyangkalnya; dan seseorang penerbang Amerika Allen Pope yang oleh kalangan luas dikenal sebagai seorang agensi CIA, benar – benar tertangkap oleh Indonesia. Ia dijatuhi hukuman mati, tetapi Presiden Sukarno

¹⁹ Franz H. Michael dan George E. Taylor, The Far East in the Modern World, Holt, Rinehart and Winston, Inc. Seattle, Washington, 1964, hal. 648.

member ampun kepadanya setelah campur tangan istri Pope, bekas pramugari American Airways²⁰.

Selama masa krisis (politik, PKI yang mendukung Presiden Sukarno dan melawan regionalis telah mendapat anger dari Presiden Sukarno, meningkatkan kegiatannya secara menyolok, karena dialah satu – satunya partai yang tidak menderita serangan anti parlemen dan anti partai. Dalam menghadapi krisis ini pemerintah Indonesia menerima bantuan senjata dari Polandia dan Czekoslovakia²¹. Yang merupakan salah satu indikasi kecenderungan Indonesia kepada blok Komunis. Amerika Serikat yang pada mulanya bersimpati kepada pemberontak, akhirnya mengadakan pendekatan dengan pemerintah Indonesia. Pada bulan Mei 1958 Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan mengutuk pemberontak, dan Amerika Serikat juga menyetujui penjualan sejumlah terbatas senjata kepada pemerintah Indonesia serta menyetujui sejumlah bantuan bahan pangan²². Amerika Serikat tidak menginginkan Indonesia lebih dekat dengan Negara – Negara Komunis karena bertentangan dengan kepentingannya.

Kegagalan para pemberontak PRRI yang disponsori oleh para pemimpin Masjumi, telah mencemarkan Masjumi dan lebih mendekatkan Presiden Sukarno kepada PKI²³ yang berarti mengarah lebih dekat kepada blok Komunis dalam politik internasional. Undang – undang Darurat perang yang diumumkan pada tanggal 15 Maret 1957, berhubungan dengan adanya pemberontakan – pemberontakan, telah mempolitisir Tentara sehingga menjadi kekuatan politik yang tidak padat diremehkan. Dengan demikian sejak pertengahan ke dua tahun 1950an terdapat tida kekuatan politik yang mendominasi arena politik dalam negeri Indonesia, yaitu Presiden Sukarno, Tentara dan PKI; dimana Presiden Sukarno lebih cenderung berfungsi sebagai ‘balancer’, dan semakin memiliki kekuasaan yang nampaknya tak terbatas.

Pada bulan agustus 1959, Presiden Sukarno menyatakan lebih jelas tujuan Demokrasi Terpimpin yang sudah ditawarkannya sejak tahun 1956. Dia memusatkan

²⁰ Donald Wilhem, “Emerging Indonesia”, Terj. Suli Sulaiman, Indonesia Bangkit, op, cit., hal. 36.

²¹ Franz H. Michael dan George E. Taylor, op. cit., hal. 655.

²² Franz H. Michael dan George E. Taylor, Ibid., hal. 65.

²³ John F. Cady, The History of Post-War Southeast Asia, Ohio University Press, Athens, Ohio, 1974, hal. 265.

perhatian pada tiga poin pokok: menyediakan makanan dan pakaian bagi rakyat, memulihkan keamanan dalam negeri, dan meneruskan perjuangan melawan imperialisme yang melibatkan perjuangan memperoleh kedaulatan atas Irian Barat dari Belanda²⁴. Untuk memperkokoh sistem Demokrasi Terpimpin, pada tanggal 17 Agustus yaitu pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke empat belas, Presiden Sukarno menyampaikan ajaran – ajarannya yang terangkum dalam istilah ‘Manipol USDEX’ dan ‘NASAKOM’. Pada kesempatan itu juga Presiden Sukarno menyerang ‘pemikiran Kebelandaan’ (“Dutch thinking”), ‘liberalisme Barat’ dan ‘individualisme’ dan meningkatkan ancamannya melawan Barat atas masalah Irian Barat. Nampaklah kecenderungan Presiden Sukarno untuk bekerjasama lebih erat dengan Negara – Negara Timur.

Kedudukan Indonesia pada situasi Perang Dingin condong pada posisi kelompok yang disebut Ner Emerging Forces (NEFOS) dari Negara – Negara Asia, Afrika dan Amerika Latin yang dilawankan dengan Old Established Forces (OLDEFOS) dari negara – Negara Imperialisme Kapitalis Barat. Selama kunjungan Presiden Sukarno ke Uni Soviet pada awal tahun 1959, Presiden di desak untuk mengambil orientasi baru, dimana Moscow melihat kebangkitan peranan Indonesia tersebut sebagai satu kesempatan menantang kesombongan Barat di Asia Tenggara dan juga untuk membentuk persekutuan melawan ancaman kemungkinan dominasi China bila suatu saat Barat telah berhasil dihalau.

Dalam masalah Irian Barat, yang memuncak pada awal tahun 1960an, PKI berada paling depan dalam melakukan kampanye merebut Irian Barat. Sedangkan tentara lebih berhati – hati, walaupun mendukung penuh, karena berdampingan dengan lawan politiknya yang semakin berkembang. Peranan menyolok PKI dalam masalah Irian Barat ini merupakan sebab utama keengganan Amerika Serikat menyokong perjuangan Indonesia di PBB, sebaliknya Uni Soviet memberikan bantuan senjata kepada Indonesia seharga kira – kira 1 milyar dollar Amerika secara kredit sehingga Indonesia merupakan Negara terkuat di Asia Tenggara; seperti dinyatakan oleh Franz H. Michael dan George E. Taylor dalam bukunya ‘The Far East in the Modern World’ sebagai berikut :

²⁴ John F. Cady, *Ibid.*, hal. 265.

“The strength of the army was based on the build-up of its armory of modern weapons during 1960 and 1962, at cost of nearly one billion dollars. The weapons, purchased in the main from the Soviet Union and other Communist countries, gave the Indonesian army command its strength in internal politics, and made it the most powerful military force in Southeast Asia”²⁵.

Ketika konflik Indonesia – Belanda nampak semakin meluas pada awal tahun 1962, Amerika Serikat yang khawatir akan terjadinya perang besar – besaran dan kecenderungan kekiri Indonesia semakin cepat, berhasil membawa ke dua pihak yang bersengketa ke meja perundingan. Dalam bulan Agustus 1962 divapai suatu persetujuan bahwa Irian Barat akan diserahkan kepada Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963.

Usaha Amerika Serikat untuk menahan kecenderungan ke kiri Indonesia tidak berhasil pada tanggal 17 Agustus 1962 Presiden Sukarno terus menyerang lembaga – lembaga demokrasi dan Kapitalisme Barat dalam pidato ‘Tahun Kemenangan’ dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan. Namun pengaruh Uni Sovietpun mulai berkurang karena Indonesia cenderung memilih China dari pada Uni Soviet dalam menganggapi konflik perpecahan China – Soviet. Kaum Maois, dalam konflik itu, memasukkan Uni Soviet sebagai revisionis dan mendudukkannya dalam kelompok Old Restablished Forces setara dengan Kapitalis Barat yang harus dihancurkan²⁶. Dengan demikian China Komunislah satu – satunya Negara yang paling berpengaruh di Indonesia.

Pada tanggal 8 Desember 1962, di Brunei Kalimantan Utara, terjadi pemberontakan menentang Federasi Malaysia. Walaupun pemberontakan dapat segera dipadamkan, namun oleh Presiden Sukarno dipandang sebagai bukti kebangkitan melawan kolonialisme. Sukarno’s interpretation of the events was that the rebels were fighting for true independence against the ‘neocolonialist’ concept of Malaysia and that the Malayan government was a puppet of British imperial policy in the region²⁷. Pada tahun 1861 Tuanku Abdul Rahman, Perdana Menteri Malaysia, telah merencanakan pembentukan Malaysia sebagai sebuah federasi dari Malaya, Singapura dan Kalimantan Utara. Dalam

²⁵ Franz H. Michael dan George E. Taylor, *op. cit.*, hal. 658.

²⁶ John F. Cady, *op. cit.*, hal. 280.

²⁷ J. Kennedy, *A History of Malaya*, Macmillan ST. Martin’s Press Inc., New York, 1970, hal. 309.

kalimat samar – samar, Presiden menyatakan bahwa ‘the events in North Borneo which are quickly altering the face of the World’²⁸. Dengan bantuan Negara – Negara Barat, terutama Inggris, Tuanku Abdul Rahman terus berusaha mewujudkan Negara Federasi yang diinginkan. Respon Indonesia ditanggapinya dengan nada permusuhan yang seimbang, sehingga pada tanggal 20 Januari 1963 Indonesia menyatakan dengan tegas politik konfrontasinya melawan pembentukan federasi Malaysia yang disponsori oleh Inggris tersebut. Dikutip oleh J.A.C Mackie dalam bukunya ‘Konfrontasi’ sebagai berikut :

“Dr. Subandrio declared that Indonesia patience was not inexhaustible and he proclaimed in a speech on 20 January, that ‘We cannot but adopt a policy of confrontation against Malaya because at present they represent themselves as accomplices of the neocolonialists and neo imperialists pursuing a hostile policy towards Indonesia’²⁹ .

Pada awal Tahun 1963 telah dimulai kampanye penggayangan Malaysia yang terkenal dengan istilah ‘ganyang Malaysia’ oleh ketiga kekuatan politik yang mendominasi saat itu, Presiden Sukarno, PKI dan Tentara, walaupun kadar dan motivasinya tidak sejalan secara penuh. PKI yang saat ini telah memihak Peking, yang otomatis didukung penuh oleh Peking, sekali lagi berada pada barisan paling depan, menggembar – gemborkan perang mati – matian melawan Malaysia dan Singapura sebagai boneka Imperialisme. Di samping itu PKI menekankan perang gerilya dalam menghadapi imperialisme di Borneo Utara. Bagi PKI, taktik perang gerilya member kesempatan mengembangkan milisi rakyat melalui para sukarelawan yang revolusioner yang akan menjadi inti tentara PKI, dan juga politik Konfrontasi akan mendorong pengasingan Indonesia dari blok Barat dan mendorong persekutuannya yang lebih akrab dengan blok Komunis³⁰.

Taktik PKI cukup berhasil, ketika politik Konfrontasi nampak tak terkendali dan kecenderungan ke kiri Indonesia semakin nyata Negara – Negara Barat menarik bantuannya kepada Indonesia. Pada tahun 1964, Amerika Serikat menghentikan

²⁸ J.A.C Mackie, Konfrontasi the Indonesia – Malaysia Dispute 1963 – 1966, Oxford University Press, London New York Melbourne, 1974, hal. 122.

²⁹ J.A.C Mackie, Ibid., hal, 125.

³⁰ John F. Cady, op. cit., hal. 281.

pengiriman beras ke Indonesia. Sementara itu pada akhir tahun 1963, Aidit telah meninggalkan sikapnya yang tidak memihak antara China dan Uni Soviet, suatu sikap yang tadinya dianut secara berhati – hati, kini ia dengan pedas mengecam Uni Soviet yang dianggapnya terlalu mesra dengan Amerika Serikat. Dalam pada itu pemerintah Presiden Sukarno mengembangkan hubungan – hubungan yang semakin erat dengan China³¹. Dengan demikian China Komunislah satu – satunya sekutu Indonesia yang memberikan dukungan secara penuh dalam masa politik ‘Konfrontasi’ dalam mana Amerika Serikat masih mengembangkan ‘containment policy’nya dimana – mana.

Sebelum konfrontasi dengan Malaysia terselesaikan, pada tanggal 30 September 1965 terjadi percobaan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh Kolonel Untung, komandan resimen Cakrabirawa pasukan pengawal Presiden, yang ternyata bersekongkol dengan pimpinan PKI. Percobaan perebutan kekuasaan dimulai dengan penculikan para perwira Angkatan Darat yang kemudian dibunuh. Namun, keadaan segera berbalik di bawah pimpinan Mayor Jenderal Suharto yang selanjutnya mengumumkan keterlibatan PKI dengan akibat permusuhan para anggota PKI secara besar – besaran, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

Peristiwa percobaan perebutan kekuasaan ini telah menghancurkan keseimbangan kekuatan antara Presiden Sukarno, Tentara dan PKI dan menandakan dominasi kekuatan pada Tentara, walaupun beberapa perwira seniornya terbunuh. PKI segera hancur dimana – mana tanpa perlawanan yang berarti, sedangkan Presiden Sukarno mulai diragukan eksistensinya sebagai Bapak Nasional yang tunggal. Walaupun pada awal post percobaan perebutan kekuasaan menampakkan dualism kepemimpinan yang membingungkan, akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966 Presiden Sukarno dihadapan Mayor Jenderal Basuki Rahmat, Brigadir Jenderal M. Yusuf dan Brigadir Jenderal Amirmachmud menandatangani sebuah ‘surat perintah’ yang kemudian terkenal dengan nama ‘Surat Perintah Sebelas Maret’ (Super Semar).

Surat Perintah itu ditujukan kepada Letnan Jenderal Suharto, Menteri Panglima Angkatan Darat untuk atas nama Presiden mengambil segala tindakan yang perlu guna

³¹ Donald Wilhem, “Emerging Indonesia”, terj. Suli Suleiman, *op. cit.*, hal. 47.

menjamin kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya Revolusi³², yang ternyata menjadi senjata yang sangat ampuh bagi Letnan Jenderal Suharto pada hari – hari berikutnya. Sebenarnya, mulai saat itu kekuasaan Presiden Sukarno, secara defacto, telah hilang.

Peking, walaupun pada waktu politik ‘konfrontasi’ memberikan dukungannya yang hebat, namun tidak melibatkan diri langsung dalam percobaan perebutan kekuasaan maupun pada masa penumpasan PKI. Sementara itu, dunia internasional seakan – akan terperanjat melihat peristiwa itu dan bersikap melihat dan menunggu perkembangan yang akan terjadi selanjutnya. Pada tanggal 12 Maret 1966, PKI dibubarkan oleh pemegang Super Semar. Walaupun pembubaran PKI ini tidak secara formal menandai renggangnya hubungan Indonesia dengan Negara – Negara Komunis yang pada masa Demokrasi terpimpin menjadi ‘sedulur sinorowedi’ namun pemerintah Presiden Suharto segera menyelesaikan masalah (konfrontasi) dan berusaha memperoleh bantuan ekonomi kembali dari Negara – Negara non Komunis Barat³³.

Uraian singkat di atas memperlihatkan bahwa selama periode 1958 – 1966, Indonesia lebih condong dan bahkan berada pada blok Komunis dalam kancah politik internasionalnya. Mula – mula dekat dengan Uni Soviet, kemudian dekat dengan China Komunis dan meninggalkan Soviet dalam perselisihan Soviet – China; walaupun Amerika Serikat berusaha merangkul Indonesia dalam rangka ‘containment policy’nya. Tumbangnya pemerintahan Presiden Sukarno memberikan arah yang Nampak sangat berlainan, termasuk politik luar negerinya.

III.1.2. Jepang

Sejak penyerahannya kepada Sekutu pada Perang Dunia ke dua tahun 1945 sampai dengan tahun 1951 saat dilangsungkannya Konferensi San Fransisco hubungan Jepang sebagai Negara dengan Negara – Negara lainnya praktis terhenti. Pada periode itu Jepang

³² Nugroho Notosusanto dan Yusmar Basri (ed.), Sejarah Nasional Indonesia, Departement Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 198, hal. 170.

³³ John F. Cady, op. cit., hal. 287.

diduduki oleh Amerika Serikat yang disebut SCAP³⁴ dibawah pimpinan Douglas Mac Arthur yang cenderung lebih menentukan corak hubungan luar negeri Jepang dari pada Jepang sendiri.

Pada tahun 1946 telah dimulai usaha perubahan konstitusi yang tentu saja dalam rangka demokratisasi dan demiliterisasi sesuai dengan kehendak SCAP. Jhon K Emmerson menulis ‘In the United States, Government Officials charged with planning for the post-surrender period had focused the air thought on two objectives: how militarism could be eradicated from Jepang and democratic processes instilled into its government³⁵’, oleh karena itulah seluruh kekuatan aparat Pendudukan Amerika dipusatkan pada usaha perlucutan senjata, demiliterisasi dan demokratisasi Jepang.

Salah satu output dari tujuan pendudukan ditambah kengerian yang dirasakan bangsa Jepang pada perang dunia ke dua adalah suatu pasal yang cukup controversial yang terkenal dengan sebutan ‘the “No-War” Article’ yang berbunyi sebagai berikut :

“aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as a means of setting international disputes.
In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized³⁶.”

Pada tanggal 12 Maret 1947, Presiden Truman menyatakan pentingnya Amerika Serikat mendukung rakyat bebas yang sedang melawan serangan yang dilakukan oleh tentara minoritas atau tekanan – tekanan dari luar, yang kemudian terkenal dengan nam ‘Doktrin Truman’. Doktrin ini pada dasarnya memulai situasi perang dingin antara Negara – Negara Kapitalis – Liberalis dengan Negara – Negara Komunis – Sosialis, pada prakteknya doktrin ini mendasari usaha Amerika Serikat menahan menjalarnya Komunisme dimana – mana yang kemudian dikenal dengan ‘containment policy’.

³⁴ SCAP singkatan dari ‘Supreme Commander for the Allied Powers, istila yang dipakai untuk menyebut para pejabat Pendudukan Amerika Serikat di Jepang.

³⁵ John K. Emmerson, Arms, Yen and Power the Japanese Dilema, Chales E. Tuttle Company, Suido 1 Chome, 2 – 6, Bungkyo-ku, Tokyo, 1976, hal. 38

³⁶ Chitoshi Yanaga, Japanese People and Politics, Jhon Willey and Sons, Inc., New York, 1956, hal 384.

Pada bulan Februari 1948, Czechoslovakia jatuh ke tangan kaum Komunis. Pada bulan Oktober 1949, China jatuh ke tangan kaum Komunis dan pada bulan Desember tahun itu juga Mao Tse-Tung menandatangani perjanjian persahabatan Sino-Soviet di Moscow yang menjanjikan perlawanan bersama melawan agresi Jepang atau Negara – Negara yang langsung atau tak langsung bergabung dengan Jepang dalam agresi sejenis. Kemudian pada tanggal 25 Juli 1950 Korea Utara menyerang menyeberang garis lintang 38 derajat.

Keadaan tersebut jeas mengancam eksistensi Amerika Serikat dan bertentangan dengan ‘containment policynya, oleh karena itu tudak aneh apabila Amerika mulai memandang Jepang dari sisi lain. Jepang yang semula harus dihukum dengan demiliterisasi eksterem, kini mulai dianjurkan membentuk pasukan ‘bela diri’ dan dipandang sebagai sekutu potensial Amerika untuk membentengi pengaruh dan infiltrasi Komunisme-Sosialisme; bahkan Washington member peringatan kepada Mac Arthur bahwa dia “harus memandang keamanan Jepang sebagai kebijaksanaan yang fundamental dan mendasar”³⁷.

Akhirnya dengan alasan bahwa Jepang seharusnya mampu menjaga ketertiban dan stabilitas dalam negerinya sendiri, SCAP meminta Perdana Menteri Yoshida untuk membentuk ‘Pasukan Cadangan Polisi Nasional’ (“National Police Reserve”) sebanyak 75.000 personiel; yang kemudian disetujui dan dibentuk. Tanpa banyak komentar, bahwa alat pertahanan ini menjadi inti kekuatan militer di masa yang akan datang, dan mengundang kontroversi dalam negeri.

Sementara itu, pendudukan yang direncanakan tidak lebih dari tiga sampai lima tahun telah berlangsung selama lima tahun. Disamping perubahan – perubahan yang secara sadar diterima positif rakyat Jepang, kini telah mulai adanya ketidak puasan dan kejemuan terutama dari kelompok kiri. Pembentukan Polisi Nasional dianggap bertentangan dengan pasal 9 Undang – Undang dasar, sebagian rakyat Jepang telah mulai merindukan kemerdekaan dan kebebasan. Nampaknya Pemerintah Pendudukan cukup mengerti disamping telah merasa cukup dalam mengemban tugas merubah Jepang, namun dibalik

³⁷ Jhon K. Emmerson, *op. cit.*, hal. 55.

niat untuk memerdekakan Jepang kembali timbul masalah yang cukup serius yaitu ‘jika SCAP meninggalkan Jepang, siapa yang akan melindunginya?’ sementara persaingan dan ancaman Komunisme semakin nyata.

Sebagai jalan ke luar masalah persimpangan jalan tersebut adalah diselenggarakannya Perjanjian Perdamaian San Fransisco pada akhir tahun 1951 yang ditandatangani secara sepihak oleh Negara – Negara Sekutu Barat non – Komunis yang sekaligus memulihkan otonomi politik Jepang dan control atas masalah – masalah luar negerinya. Namun Jepang dan control atas masalah – masalah luar negerinya. Namun Jepang menandatangani Perjanjian Keamanan dengan Amerika Serikat yang memasukkannya ke dalam kubu Barat sebagai syarat pengakhiran pendudukan Amerika Serikat. Perjanjian Keamanan menetapkan bahwa militer Amerika Serikat. Perjanjian Keamanan menetapkan bahwa militer Amerika Serikat akan tetap berada di Jepang setelah kemerdekaan diberikan³⁸, yang memberikan isyarat bahwa Jepang tetap dalam perlindungan Amerika Serikat. Jika diminta, pemerintah Jepang dapat menggunakan militer Amerika di Jepang untuk menindas huru – hara dalam negeri yang dihasut dari luar negeri³⁹. Walaupun ditentang oleh kelompok kiri, ratifikasi perjanjian Keamanan tersebut berjalan mulus dalam Diet pada tanggal 14 September 1951.

Setelah diberi kemerdekaan pada tanggal 28 April 1952, Jepang mulai mengembangkan karir kemandiriannya dalam kancah internasional dengan menjalin kembali hubungan diplomatic dengan Negara – Negara tetangga. Dengan Uni Soviet, Jepang menjalin hubungan kembali pada tahun 1956, dengan China Nasionalis (Taiwan) pada tahun 1952, dengan Indonesia pada tahun 1958, dengan Korea Selatan pada tahun 1965; dan dengan Negara – Negara lain dalam rangka memperoleh kembali apa yang telah hilang dalam perang. Dengan diplomasinya yang khas, Jepang dapat diterima oleh semua Negara walaupun dengan syarat – syarat tertentu.

³⁸ J.A.A Stockwin, “Divided Politics in a Growth Economu”, terj. Nin Bakdi Sumanto, Pluralisme Politik dan Kemajuan ekonomi Jepang, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1984, hal.83.

³⁹ Jhon K. Emmerson, op. cit., hal. 73.

Karena peranan militer Jepang tidak mungkin dapat diandalkan lagi dan keamanan Jepang yang cukup terjamin oleh ‘payung nuklir’ Amerika Serikat, seperti termuat pada pasal V dari perjanjian itu:

“Each Party recognizes that an armed attack against either Party in the territories under the administration of Japan would be dangerous to its own peace and safety and declares that it would act to meet the common danger in accordance with its constitutional provisions and processes”⁴⁰.

Pasal ini membedakan dengan jeas dari fakta – fakta pertahanan yang ditandatangani Amerika Serikat dengan Republik Korea, China Nasionalis, dan Filipina, atau dengan Australis dan New Zealand dalam fakta ANZUS. Dalam persetujuan – persetujuan itu semua pihak memikul bersama – sama terhadap serangan militer dari luar yang ditujukan kepada wilayah milih salah satu dari pihak – pihak yang bersangkutan. Dalam perjanjian Amerika Serikat dengan Philipina, misalnya, kedua pihak memikul tanggung jawab bersama terhadap suatu serangan militer di Pasifik atau wilayah salah satunya. Karena perjanjian dengan Jepang dengan jelas hanya menguntungkan bagi wilayah penguasaan Jepang, Jepang tidak diwajibkan memberikan bantuan kepada Amerika Serikat, kecuali hanya mempertahankan dirinya sendiri. Dengan demikian Jepang dapat memusatkan energinya dengan leluasa dalam politik internasionalnya dalam rangka mencapai kepentingan nasionalnya.

Jepang merupakan Negara pulau yang kecil, luas secara keseluruhannya 369.662 kilometer persegi dan hanya enam belas persennya dapat ditanami. Terdiri dari pulau – pulau pokok Hokkaido, Honshu, Shikoku dan Khushu; dan terdapat lebih dari 3.300 pulau – pulau kecil dalam batas – batas wilayahnya. Dari segi sumber alam, Jepang termasuk Negara miskin. Pada pertengahan kedua tahun enam puluhan, untuk kepentingan industrinya, Jepang harus mengimpor seluruh kebutuhan bauxite, seluruh kebutuhan karet alam, seluruh kebutuhan batu fosfat, seluruh kebutuhan nikel, seluruh kebutuhan kapas dan wool, 98 persen kebutuhan minyak mentah, 95 persen kebutuhan bijih besi, 85 persen kebutuhan tembaga, dan 49 persen kebutuhan kokas batu bara. Jepang juga menderita kekurangan yang serupa dalam hal makanan, Jepang mengimpor 90 persen kebutuhan

⁴⁰ Jhon K. Emmerson, *op. cit.*, hal. 81.

gula, 83 persen kebutuhan kedelai, 82 persen kebutuhan gandum, dan 36 persen kebutuhan ‘barley’⁴¹. Sedangkan jumlah penduduknya menurut sensus penduduk tahun 1965, sejumlah 98.281.955 jiwa, rangkin ke tujuh setelah China, India, Uni Soviet, Amerika Serikat, Indonesia dan Pakistan⁴².

Melihat latar belakang ekologi Jepang secara sepintas tersebut di atas dapatlah dilihat bahwa Jepang sangat tergantung kepada lingkungan internasionalnya, Jepang tidak mungkin hidup baik tanpa adanya kondisi internasional yang sesuai dengan kondisi ekologi Jepang. Nampaknya, hanya terdapat dua kemungkinan lingkungan internasional bagi Jepang yang menjamin eksistensinya untuk memperoleh apa yang dibutuhkan; pertama, menguasai lingkungan internasionalnya, atau ke dua, bekerjasama seerat – eratnya dengan lingkungan internasionalnya. Konsep ‘Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya’ yang juga memasukkan Asia Tenggara, merupakan gejala kemungkinan pilihan Jepang yang pertama, yaitu keinginan menguasai lingkungan internasionalnya yang dilakukan secara paksa dan telah mewarnai Perang Dunia ke dua. Kekalahannya dalam Perang Dunia ke dua dan telah berlangsungnya perubahan cukup mendasar oleh SCAP, politik Jepang setelah pendudukan nampaknya cenderung pada kemungkinan pilihan yang ke dua yaitu bekerjasama seerat – eratnya dengan lingkungan internasionalnya.

Diplomasi khas Jepang yang biasa disebut ‘diplomasi ekonomi’ dalam hubungan internasional post pendudukan, membuktikan suatu gejala keinginan Jepang untuk mengadakan kerjasama seerat – eratnya dengan lingkungan internasionalnya. Diplomasi Ekonomi Jepang berisi pertama, mengelakkan kecenderungan instabilitas di dalam politik internasional dan mengikuti suatu diplomasi positif yang menguntungkan kepentingan nasional Jepang, kedua, aktif ikut serta dalam organisasi kerjasama untuk kestabilan

⁴¹ Robert E. Ward, Japan’s Political System, Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1967, hal. 26.

⁴² Robert E. Ward, ibid., hal. 30.

perekonomian dunia, memecahkan masalah energy dan memecahkan masalah Utara – Selatan⁴³.

Namun, apa yang dinamakan ‘diplomasi Ekonomi’ ini tidak lepas dari sasaran kritik, bahwa hal tersebut tidak lebih dari usaha mengejar Barat dan usaha menghapuskan rasa rendah diri setelah kehancurannya dalam Perang Dunia kedua yang pada gilirannya menjadi suatu sasaran yang membenarkan segala cara apapun⁴⁴. Lebih dari itu bahwa logika untuk membenarkan segala sesuatu dan apa saja daam kaitan dengan industrialisasi serta ‘mengejar Barat’ menjadi begitu kuat dan mutak sehingga statusnya meningkat menjadi moralitas atau ideology nasional⁴⁵. Nampaknya memang begitulah Jepang, politik ini dipegang secara konsisten, seperti dinyatakan oleh pemerintah Fukuda yang menyebut hubungan luar negeri Jepang dengan ‘Omni-directional Diplomacy’ yaitu semua bentuk diplomasi yang memungkinkan Jepang mengadakan hubungan yang dekat dengan setiap bangsa di dunia apabila hubungan itu membawa hasil yang positif bagi kemajuan kepentingan Nasional Jepang, tanpa memandanga ideology dan politiknya⁴⁶.

Sikap politik internasional Jepang semacam ini ternyata mendorong kemajua ekonomi sampai pada tingkat yang cukup menakjubkan yang dimulai pada awal tahun 1950an dan pada tahun 1960an telah Nampak hasilnya. Disamping sikap politik tersebut, secara terperinci Herman Kahn menguraikan sebab – sebab kemajuan ekonomi yang dicapai Jepang setelah Perang Dunia kedua, baik sebab – sebab dari dalam maupu sebab – sebab dari luar. Sebab – sebab dari dalam antara lain :

1. A great deal of available energy and dediction and the general Japanese capacity for purposive, communal action;
2. Stringent population limitation;
3. Appropriate and available organizational skills, judgment, and motivation-both governmental and private;
4. Relatively high technological and educational levels;

⁴³ Badan Litbang Deplu RI, Jepang Sebagai Kekuatan di Asia, Badan Penerbitan dan Pengembangan Departement Luar Negeri RI, 1981, hal. 22.

⁴⁴ Ishihara Shintaro, “Satu Bangsa Tanpa Moralitas”, dalam Yayasan Obor Indonesia (penterj.), op. cit., hal. 45.

⁴⁵ Ibid., hal. 46.

⁴⁶ Badan Litbang Deplu Ri, op. cit., hal. 21.

5. High savings and investment rate;
6. Japanese version of free enterprise;
7. Skillful government direction and intervention (and a reasonably cooperative and sensible policy on the part of the United States);
8. All kinds of pressures to attain “higher market shares” and to go into advanced technology and industries of the future;
9. Ruthless refusal to support – or even actively “sabotage” – “obsolete” or “not for Japanese” business; equally ruthless support and protection of modern growth industries and advantageous export industries;
10. Willingness to switch to “economic growth” as major tactic in “catching up with the west”;
11. Desirable and inexpensive work force readily available.

Sedangkan sebab – sebab dari luar adalah sebagai berikut :

1. Less than 1 percent of the GNP allote to defense;
2. Stimulus of Korean war (and later Vietnam war);
3. Influx of American capital;
4. U.S. a prosperous and avid customer;
5. Technology available at bargain rates – first from the Americans and later from Europeans;
6. General atmosphere of free trade and rising levels of world trade;
7. Discovery in Australia and elsewhere of large new mineral deposits
8. Developments in ocean transport⁴⁷.

Uraian singkat tersebut di atas menggambarkan bahwa tekanan politik internasional Jepang setelah Perang Dunia pada ‘fokus ekonomi’, nampaknya Jepang ingin memperkuat ekonominya guna peranannya kembali pada masalah – masalah internasional yang lebih luas. Keterlibatan Jepang dalam Konferensi Asia – Afrika di Bandung tahun 1955 dan peran penengahnya dalam masalah persengketaan Indonesia – Malaysia pada tahun 1963 – 1966 tidak lain dalam rangka ‘diplomasi ekonominya’, kepentingan nasionalnya untuk memperoleh apa yang diinginkan, terutama bahan mentah bagi industrinya. Sedangkan politik luar negerinya mengikuti kebijakan Amerika Serikat⁴⁸.

III.2. Hubungan Republik Indonesia – Jepang, 1958 – 1966.

⁴⁷ Herman Kahn, The Emerging Japanese Superstate Challenge and Respons, Prentice – Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1971, hal. 76.

⁴⁸ Deplu, Studi Kerjasama Ekonomi Perdagangan dan Kerjasama Teknik serta Potensi Pengembangannya ant. RI – Jep, hal. 5.

Telah disebutkan di depan bahwa hubungan resmi Republik Indonesia – Jepang dibuka pada tanggal 15 April 1958. Hubungan Republik Indonesia – Jepang merupakan hubungan antara dua Negara yang mempunyai perbedaan – perbedaan yang cukup mendasar, terutama dalam pelaksanaan politik luar negerinya; namun hubungan mereka, yang didasari oleh perjanjian perdamaian dan perjanjian pampasan perang, relative akrab belum pernah terjadi ketegangan yang berarti. Hubungan mereka diwarnai oleh pelaksanaan pembayaran pampasan perang.

Dilihat dari satu sisi hubungan Republik Indonesia – Jepang merupakan hubungan yang tidak seimbang; dalam kadar yang berbeda, seperti hubungan Amerika Serikat – Jepang. Bila hubungan Amerika Serikat – Jepang Amerika Serikatlah yang banyak terlibat dalam masalah dalam negeri Jepang; sedangkan hubungan Republik Indonesia – Jepang, Jepanglah yang lebih banyak terlibat masalah – masalah Indonesia dibanding dengan Indonesia terlibat dalam masalah – masalah Jepang. Namun demikian bukan berarti Jepang memiliki derajat yang lebih tinggi disbanding dengan Indonesia dalam hubungan internasional, karena Jepang mempunyai kepentingan untuk itu. Jepang tidak mungkin melengahkan diri dari memperhatikan perkembangan Negara non – Komunis terbesar dan terkaya di Asia Tenggara.

III.2.1. Pertukaran Kunjungan para Pejabat Jepang – Indonesia.

Pertukaran kunjungan para pemimpin pemerintahan antara dua Negara dalam hubungan internasional merupakan salah satu tanda eratnya hubungan mereka. Pertukaran kunjungan antara para pejabat tingkat tinggi Jepang dan Republik Indonesia kadang – kadang dipermudah dengan adanya masalah bersama untuk dipecahkan dan untuk meredakan ketegangan. Apakah hubungan timbale – balik antara dua bangsa dalam kwantitas yang tidak seimbang menandai perbedaan tinggi rendahnya posisi suatu bangsa dengan bangsa yang lain, belumlah dapat selalu diberi jawaban ‘iya’; tetapi memang merupakan kenyataan bahwa kunjungan para pejabat Indonesia ke Jepang lebih sering daripada sebaliknya.

Setiap Perdana Menteri Jepang sejak Kishi nobosuke dan setiap Menteri Luar Negeri sejak Okazaki (dengan pengecualian Shigemitsu, Kosaka, dan Miki) telah mengunjungi Indonesia secara resmi setidaknya – tidaknya sekali selama masa jabatannya.

Menteri Luar Negeri pertama setelah perang yang mengunjungi Indonesia adalah Okazaki pada tahun 1953 dan Perdana Menteri pertama mengunjungi Indonesia adalah Kishi Nobosuke pada tahun 1957⁴⁹.

Kunjungan Jepang ke Negara – Negara asing tidak lain dalam rangka industrialisasi dan mengejar ketinggalan dengan Barat. Sampai saat kunjungan Kishi ke Indonesia pada tahun 1957. Amerika Serikat, Canada dan Eropa Barat masih lebih penting bagi Jepang daripada Asia. Setelah tahun 1957 Jepang menjadi lebih antusias mengadakan hubungan dengan Negara – Negara Asia, dan oleh sebab itu, para pejabat Jepang mulai mengadakan kunjungan – kunjungan. Pada tahun 1963 dan tahun 1967, Perdana Menteri Ikeda Hayato dan Sato Eiksaku melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia yang diperluas ke Austria dan New Zealand.

Kunjungan para pejabat Jepang ke Negara – Negara asing termasuk Indonesia berlangsung pendek, terjadwal dengan ketat, dan biasanya ditambah dengan komunis bersama yang dinyatakan dengan hati – hati, dalam usaha pendekatan oleh para pejabat kementerian luar negeri. Bagi para pejabat Indonesia, Jepang dipandang sebagai tempat yang menguntungkan baik bagi kunjungan resmi maupun kunjungan tidak resmi, Tokyo merupakan tempat persinggahan yang mudah untuk menuju Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa – Bangsa dan Eropa Barat melalui Kutub Utara, dan bahkan ke Korea Utara. Tabel berikut menunjukkan kuantitas kunjungan antara tahun 1957 sampai tahun 1966. Dari tabel ini dapat dilihat bahwa dari tahun 1958 sampai dengan tahun 1964 Presiden Sukarno mengadakan kunjungan ke Jepang sebelas kali, namun dari kunjungannya tersebut hanya sekali yang resmi yaitu pada tahun 1958, sedangkan sisanya merupakan kunjungan tak resmi atau merupakan pertemuan dengan para pemimpin Malaysia dan Filipina dalam rangka menyelesaikan sengketa Indonesia – Malaysia. Dalam tahun – tahun tertentu Presiden Sukarno mengunjungi Jepang lebih dari sekali, pada tahun 1960 dan 1961 Presiden Sukarno mengunjungi Tokyo masing – masing dua kali dan pada tahun 1964 tiga kali.

⁴⁹ Masashi Nishihara, *op. cit.*, hal. 27.

Dalam masa tersebut, Menteri Luar Negeri Subandrio dalam pemerintahan Presiden Sukarno juga mengunjungi Jepang dalam kuantitas yang tinggi. Antara tahun 1957 dan 1965 Subandrio mengunjungi Jepang dua puluh satu kali.

Wajah menarik lain dari kunjungan ke luar negeri para pejabat Indonesia adalah besarnya rombongan. Rombongan Presiden Sukarno dalam kunjungan – kunjungannya ke Tokyo cukup besar, dari 13 orang pada tahun 1958 sampai

TABEL I
VISITS OF JAPANESE PRIME MINISTERS AND FOREIGN
MINISTERS IN INDONESIA AND INDONESIAN PRESIDENT
AND FOREIGN MINISTERS IN JAPAN,
1957 - 1966⁵⁰.

Name of Official	Term of office	Dates of Visits	Duration of Visits (day)	Size of Party (no of persons)
Japanese Prime Ninisters				

⁵⁰ Masashi Nishihara, *Ibid.*, hal. 28 - 29.

Kishi	1957 - 1960	Nov. 26 - 28,1957	3	13
Ikeda	1960 - 1964	Sept. 26 - 28,1963	3	14
Japanese Foreign Ministers				
Fujiyama	1957 - 1960	Nov. 26 - 28,1957	3	*
		Jan. 19 - 23,1958	5	*
Kosaka	1960 - 1962	no visit		
Ohiro	1962 - 1964	Sept. 26 - 28,1963	3	*
Shiina	1964 - 1966	Oct. 25 - 28,1966	4	*
Indonesian President				
Sukarno	1945 - 1968	Jan. 29 - Feb. 15,1958	18	13
		June 6 - 18, 1959	14	29
		May. 24 - June. 3, 1960	11	33
		Sept. 26 - 28,1960	3	35
		June. 23 - July. 2, 1961	10	44
		Sept. 18 - 21, 1961	4	50
		Nov. 4 - 21,1962	18	40
		May. 23 - Juni. 2, 1963	11	30
		Jan.15 - 20,1964	6	61
		Juni. 7 - 21, 1964	15	30
		Oct. 26 - Nov. 1, 1964	7	44

Name of Official	Term of office	Dates of Visits	Duration of Visits (day)	Size of Party (no of persons)
Indonesian Foreign Minister				
Subandrio	1957 - 1966	Sept. 18 - 20, 1957	3	*
		April. 15 - 18, 1958	4	*
		Oct. 13 - 17, 1959	5	*
		Nov. 14 - 21, 1960	8	*
		June. 24 - July. 2, 1961	9	*
		Oct. 2 - 3, 1961	2	*
		Dec. 1 - 3, 1961	3	*
		March. 13, 1961	1	*
		Aug. 10 - 11, 1962	2	*
		Aug. 19, 1962	1	*



		Nov. 17 - 21, 1962	5	*
		May. 23 - Juni. 2, 1963	11	*
		June. 13 - 15, 1963	3	*
		Sept. 20, 1963	1	*
		Sept. 26, 1963	1	*
		Jan. 15 - 20, 1964	6	*
		June. 7 - 21, 1964	15	*
		Oct. 26 - Nov. 1, 1964	7	*
		Nov. 26 - 29, 1964	4	*
		Feb. 11 - 14, 1965	4	*
		May. 19 - 25, 1965	7	*

61 orang pada tahun 1964. Rombongan – rombongan besar ini memasukkan/mengikutsertakan menteri – menteri cabinet seperti Subandrio, Leimena, Sultan Hamengku Buwono IX, Chairul Saleh, Ahmad Yani, dan A.H. Nasution, enam menteri pada tahun 1960 dan tujuh menteri pada September 1961. Sebaliknya, rombongan Kishi pada tahun 1957 dalam berkunjung ke Indonesia hanya terdiri dari 13 orang.

Kebanyakan perjalanan Presiden Sukarno diistilahkan ‘istirahat ke luar’, tetapi kenyataannya sering disertai pembicaraan serius dengan para pemimpin Negara tuan rumah, memaparkan masalah bangsa Indonesia tentang Irian Barat dan mengokohkan politik luar negeri ‘bebas aktifnya’ dalam kesempatan – kesempatan upacara kenegaraan biasa. Kecepatan kunjungan Presiden Sukarno ke Tokyo sering dinyatakan sebagai perhentian terakhir dari sebuah ‘istirahat ke luar’ yang panjang. Di Jepang, di samping menyukai makanan, minuman dan wanita Jepang, Presiden Sukarno juga mengadakan bisnis dengan para pejabat pemerintah dan para usahawan yang penting bagi Indonesia dan mengadakan pertemuan kembali dengan kawan – kawan pada masa perang. Antara tahun

1957 dan 1964, Presiden Sukarno menghabiskan 117 hari di Jepang, sedangkan Perdana Menteri Kishi dan Ikeda hanya menghabiskan waktu 6 hari di Indonesia dalam periode yang sama. Dengan demikian, Jepang merupakan satu – satunya Negara yang paling sering di kunjungi Presiden Sukarno dengan waktu tinggal cukup lama dan dengan pengiring yang cukup besar pula⁵¹. Keadaan ini tidak dapat disangkal, merupakan tanda keakraban.

III.2.2. Pelaksanaan Pembayaran Pampasan Perang⁵².

Pampasan perang Jepang kepada Indonesia, sejumlah \$ 223,08 juta, dibayar selama dua belas tahun dalam bentuk pelayanan dan barang – barang modal. Hal ini menarik para usahawan dan pemimpin – pemimpin politik kedua Negara, yang melihat kemungkinan keuntungan besar dalam proyek – proyek dengan dana pampasan ini. Dana pampasan yang direncanakan \$ 20 juta per tahun dalam sebelas tahun dan sisanya pada tahun ke dua belas ini, ternyata pelaksanaannya mengalami kesulitan dan ketidak tepatan sehingga beberapa proyek yang dibiayai dengan dana pampasan tertunda, tidak terselesaikan atau tidak operasional. Hal ini, salah satu aspek penyebabnya adalah ketidakefisienannya pemerintah Indonesia dan gangguan – gangguan politik dalam negeri Indonesia. Namun jangka waktu pembayaran tepat dua belas tahun, 15 April 1958 sampai dengan 14 April 1970.

Ketidak-tepatan pembayaran pampasan perang dapat diterangkan di sini, misalnya, pembayaran pada tahun ke empat melonjak melebihi dari jumlah yang terjadwal yaitu sejumlah \$ 39,52 juta, sedangkan pembayaran pada tahun ke lima merosot kurang dari pembayaran yang terjadwal, walaupun jumlah keseluruhannya tidak melebihi dari jumlah yang dijadwalkan. Pemerintah Indonesia menggunakan dana pampasan untuk proyek – proyek besar yang teralokasikan, dan pada tahun 1963 menjadi jelas bagi Jepang bahwa hutang – hutang luar negeri Indonesia akan harus dibayar/ di tutup dengan dana pampasan . laporan pemerintah Jepang menyatakan dalam tahun 1964 dana akan telah habis.

Masalah terbesar dalam pembayaran pampasan perang muncul setelah Desember 1965 ketika Indonesia mulai menggunakan dana pampasan untuk melunasi pinjaman – pinjamannya, hal ini merupakan salah satu kesulitan yang menjadikan ketidakberesan.

⁵¹ Masashi Nishihara, *Ibid.*, hal. 30.

⁵² Ringkasan dari “The Reparations Payment and Its Effects, 1958 – 1965”, dalam Masashi Nishihara, *ibid.*, hal. 80 – 95.

Segera setelah persetujuan pampasan perang mulai berlaku, Indonesia memutuskan untuk beberapa proyek pembangunannya dibiayai dengan pinjaman – pinjaman dari Jepang, terpisah dari dana pampasan. Pada tanggal 16 Oktober 1959, setelah mengadakan perundingan selama kira – kira satu tahun Menteri Luar Negeri kedua Negara Fujiyama Aichiro dan Subandrio menyusun persetujuan pinjaman dan menyetujui bahwa pinjaman – pinjaman itu akan dikembalikan dalam dolar Amerika. Jika Indonesia tidak dapat membayar kembali pinjaman – pinjaman itu, akan dipotongkan dari dana pampasan. Antara tahun 1959 dan 1963, Indonesia telah meminjam empat kali sejumlah \$ 81,7 juta atau \$ 94,76 juta dengan bunganya. Pinjaman – pinjaman yang terikat dengan dana pampasan, tetapi program – programnya sendiri sering saling tumpang – tindih secara financial. Pembayaran kembali pinjaman – pinjaman ini mulai pada bulan Agustus 1961 dan terus berlangsung sampai bulan November 1965, ketika terjadi percobaan kudeta pada bulan September 1965 memerosotkan mata uang asing yang dimiliki Indonesia dan menghambat pembayaran kembali lebih lanjut. Kemudian dana pampasan perang harus digunakan untuk menutup pinjaman – pinjaman yang masih harus diselesaikan. Akibatnya, bagian terbesar dari program – program pampasan yang masih berlangsung, terhenti atau tertunda.

Dana pampasan yang disetujui pada tahun 1958 tersebut akan digunakan untuk membiayai enam kategori program dan proyek yang meliputi: transportasi dan komunikasi, pembangunan tenaga listrik, pembangunan industry, pembangunan pertanian dan perikanan, pertambangan dan jasa. Selama periode pembayaran dua belas tahun, sejumlah dua puluh enam proyek besar terlaksana dan dibiayai dengan dana pampasan, walaupun tidak seluruhnya selesai dengan sempurna pada tahun terakhir pembayaran. Dua puluh enam proyek tersebut menghabiskan dana sebesar \$ 77, 63 juta, atau 35 persen dari seluruh dana pampasan \$ 223,08 juta. Diantaranya proyek irigasi pengendali banjir di Jawa Timur; pabrik kertas di Sumatera Utara, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan; pabrik tekstil di Bandung dan Jakarta; dan sistem tenaga air di Jawa Timur. Proyek yang paling mahal merupakan sebuah bendungan seharga \$ 19,237 juta, yang dibangun di Karangates di hulu sungai Brantas Jawa Timur.

Salah satu proyek lain yang dibiayai oleh dana pampasan adalah program pendidikan dan latihan bagi para pemuda Indonesia. Hampir 100 mahasiswa dikirim ke Jepang setiap tahun mulai tahun 1960 selama lima sampai tujuh tahun pendidikan di Universitas, dan kira – kira 250 pemuda Indonesia pergi ke Jepang selama masa dua setengah tahun dalam rangka latihan penguasaan dan profesi dalam perusahaan – perusahaan swasta dan dinas – dinas pemerintahan. Keseluruhannya sejumlah 500 mahasiswa telah dikirimkan dalam lima tahun dan 1750 tenaga terlatih dalam tujuh tahun. Di bawah kontrak – kontrak perseorangan beberapa dosen orang Indonesia diberikan latihan teknik untuk memimpin pabrik – pabrik dan fasilitas – fasilitas lain dimasukkan sebagai proyek – proyek pampasan. Diperkirakan 2.500 orang Indonesia menerima latihan teknik atau pendidikan di bawah persetujuan pampasan.

Beberapa proyek yang dibiayai oleh pinjaman – pinjaman yang terpisah dari dana pampasan antara lain: empat hotel yang cukup megah di Jakarta, Pelabuhan Ratu, Yogyakarta dan Bali; pusat pertokoan di Jakarta; galangan kapal di Surabaya, jembatan sungai musi di Palembang; pabrik kertas di Banyuwangi Jawa Timur; dan enam belas kapal dan sepuluh kapal patrol pantai. Namun proyek ini beberapa diantaranya akhirnya dikombinasikan dengan proyek pampasan, misalnya pembangunan beberapa hotel dan jembatan sungai Musi di Palembang Sumatera Selatan.

Walaupun mengalami kesulitan dan masalah – masalah pelaksanaan pembayaran pampasan perang, misalnya, ketidak tepatan jumlah pampasan tahunan dan tercampurnya dana pampasan dengan pinjaman – pinjaman, namun pembayaran pampasan tepat selama dua belas tahun. Hal ini dapat dilihat sebagai salah satu indikasi stabilnya hubungan Republik Indonesia – Jepang pada periode tersebut.

III.2.3. Jepang dan Persengketaan Indonesia – Malaysia 1963 – 1966.

Sejak diberi kemerdekaan kembali pada bulan April 1952, Jepang dapat memusatkan perhatiannya pada pembangunan ekonomi karena keamanan Jepang dijamin oleh Amerika Serikat melalui perjanjian pertahanan keamanan bilateral. Telah dipaparkan di depan bahwa ekonomi Jepang telah mulai mantap pada akhir tahun 1950an dan awal tahun 1960an yang didukung oleh faktor – faktor dalam maupun luar.

Kiranya tidak banyak disangkal bahwa semua kekuatan yang ada pada suatu Negara, termasuk kekuatan ekonomi pada gilirannya untuk mencapai tujuan politiknya. Tekanan politik luar negeri Jepang periode setelah perang diletakkan pada usaha memperoleh kembali hal – hal yang telah hilang pada masa perang, seperti dinyatakan oleh Akio Watanabe sebagai berikut;

“Until recently, efforts to get back what Japan lost in the war-independence, prosperity, honor, international position, and national self-confidence have consistently formed the main theme of Japanese foreign policy”⁵³.

Sedangkan perwujudan dari tekanan politik luar negeri tersebut adalah dengan ‘diplomasi ekonomi’.

Dalam rangka diplomasi ekonomi itu juga Jepang menjalin hubungan dengan Indonesia. Jepang sangat berhati – hati memelihara hubungannya dengan Indonesia, berusaha menghindari konflik politik sedapat mungkin. Namun hubungan Indonesia – Jepang pernah mengalami ketegangan – ketegangan, walaupun akhirnya tidak mempengaruhi hubungan akrab Indonesia – Jepang. Ketegangan – ketegangan tersebut berlangsung ketika terjadi insiden ‘Karel Doorman’ pada tahun 1960 dan insiden maskapai penerbangan Belanda KLM pada tahun 1962, walaupun sejak kampanye Irian Barat, pemerintah Jepang mengambil sikap netral⁵⁴.

Pada bulan Juni 1960 Duta Besar Belanda di Tokyo meminta izin untuk singgah di pelabuhan Jepang bagi kapal Induk Perangnya, Karel Doorman, guna mengisi bahan bakar dan persediaan air, dalam rangka pertahanan Irian Barat. Kedutaan Indonesia dan perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Jepang memprotes keras rencana persinggahan Kapal Perang tersebut kepada pemerintah Jepang. Protes Indonesia tersebut mendapat dukungan dari Partai Sosialis Jepang dan Perhimpunan Jepang – Indonesia yang pada saat itu diketuai oleh Tani Masayuki. Pada tanggal 3 September Kapal Perang Karel Doorman dikabarkan meninggalkan perairan Irian Barat dan menuju ke Jepang. Dalam pada itu Partai Sosialis Jepang memprotes keras dan Indonesia mengancam memutuskan hubungan

⁵³ Akio Watanabe, “Japanese Public Opinion and Foreign Affairs: 1964 – 1973, dalam Robert A. Scalapino (ed) The Foreign Policy of Modern Japan, University of California Press, Berkeley- Los Angeles- London, 1977, hal. 112.

⁵⁴ Masashi Nishihara, op. cit., hal. 158.

ekonomi dengan Jepang. Dalam tekanan yang demikian keras, Menteri Luar Negeri Kosaka membatalkan keputusannya, menyatakan bahwa dia tidak ingin memperdagangkan kawan Asia dengan sebuah kapal perang, dan hari itu juga menyampaikan keputusan barunya kepada duta besar Belanda. Akhirnya kapal perang Belanda Karel Doorman kembali ke Holandia (sekarang Jayapura) pada tanggal 9 september⁵⁵.

Ketegangan lain, suatu insiden serupa yang terjadi pada bulan Februari 1962. Pada tanggal 30 Januari tahun itu juga maskapai penerbangan Belanda KLM meminta izin pemerintah Jepang untuk mendaratkan tiga kapal terbangnya di pelabuhan udara Tokyo (membawa sejumlah 211 personel pemerintahan) dalam perjalanannya menuju ke Biak, Irian Barat. Jepang menolak member izin karena takut menimbulkan ketegangan baru dengan Jakarta. Kemudian pada tanggal 3 Februari pemerintah Belanda mengangkut personel militernya dengan penerbangan komersil biasa KLM menuju ke Biak lewat Tokyo. Karena Jepang tak memiliki legalitas untuk menolak maka Jepang mengetatkan keamanan kedutaannya di Jakarta, kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta, kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta diserang masa ketika Amerika Serikat member izin serupa kepada Belanda. Walaupun Jepang memprotes kepada Pemerintah Belanda, tetapi pemerintah Belanda malahan mengangkut lebih banyak tentaranya, dengan berpakaian sipil, pada tanggal 6 dan 10 Februari. Kejadian itu menimbulkan protes keras yang dilakukan oleh PPI, yang selanjutnya mengadakan demonstrasi kedutaan besar Belanda di Tokyo. Di Indonesia juga terhadai reaksi, diantaranya Surabaya, kantor konsulat Jepang di lempari batu. Di dalam pemerintahan Jepang sendiri terjadi tekanan dan protes yang dilakukan oleh Partai Komunis Jepang, dan juga nota kekhawatiran yang disampaikan oleh Perhimpunan Jepang – Indonesia. Namun demikian, Jepang tetap merasan tidak mampu mendapatkan jalan mencegah pengangkutan militer yang dilakukan oleh Belanda dengan cara tersebut. Nampaknya pemerintah Belanda mulai terdesak dalam masalah Irian Barat, sehingga akhirnya pada tanggal 5 Maret Menteri Luar Negeri Belanda Joseph Luns memberitahukan kepada menteri luar negeri Jepang bahwa pemerintahnya tidak akan lebih lama membingungkan pemerintah Jepang dan kemudian insiden itu berakhir⁵⁶.

⁵⁵ Masashi Nishihara, *op. cit.*, hal. 158 – 160.

⁵⁶ Masashi Nishihara, *Ibid.*, hal. 160 – 161.

Dari dua insiden tersebut di atas, di Indonesia timbul kesan bahwa Jepang cenderung memihak Belanda pada masalah Irian Barat, namun Jepang, nampaknya lebih mendudukan dirinya sebagai berkedudukan netral. Nampaknya masalah ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan Jepang ini segera dapat terlupakan karena pada akhirnya Indonesia memenangkan Irian Barat menjadi bagian integral Republik Indonesia.

Politik NEFOS dan OLDEFOS Presiden Sukarno, tidak dapat tidak menempatkan Indonesia dalam posisi berlawanan dengan Barat; politik ini mungkin merupakan konsistensi dari sikap Presiden Sukarno yang sangat anti imperialisme dan kolonialisme⁵⁷, sehingga ketika Tengku Abdul Rahman merencanakan sebuah Federasi Malaysia yang disponsori oleh Inggris dan Megara – Negara Barat yang lain, Presiden Sukarno menentanginya. Persengketaan Indonesia – Malaysia ini kemudian terkenal dengan istilah ‘konfrontasi’. Konfrontasi baru berakhir tidak lama setelah terjadi percobaan kup yang gagal oleh PKI tetapi juga melemparkan Presiden Sukarno dari kekuasaan, walaupun secara evolusioner, dan kekuasaan kemudian jatuh ke tangan etnan Jenderal Suharto.

Kekhawatiran Jepang terhadap pengaruh konflik Indonesia – Malaysia di kawasan Asia Tenggara yang potensial menguntungkan Jepang dan kekuatan ekonominya yang telah mulai dapat diandalkan, Jepang berusaha mencampuri masalah konflik Indonesia – Malaysia, walaupun tidak diminta oleh pihak – pihak yang bersengketa.

Usaha pertama yang dilakukan Jepang adalah mempertemukan Presiden Sukarno dengan Tengku Abdul Rahman di Tokyo yang diusahakan oleh Menteri Luar Negeri Ohira Masayoshi dengan membujuk Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio ketika pada tanggal 24 Mei berkunjung ke Tokyo.

Pertemuan berhasil diselenggarakan pada tanggal 31 Mei sampai dengan 1 Juni 1963 yang menghasilkan kesepakatan menyelesaikan sengketa dengan damai dan merencanakan pertemuan puncak tiga Negara Indonesia, Malaysia dan Filipina. Pertemuan puncak pemimpin ketiga Negara tersebut berlangsung pada tanggal 30 Juli sampai dengan 5 Agustus 1963 menghasilkan rencana pembentukan persekutuan yang disebut Maphilindo dan Tengku Abdul Rahman menyetujui penundaan proklamasi

⁵⁷ Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 1978, hal. 118.

kemerdekaan Federasi sampai team penyelidik dari PBB mengumumkan hasilnya. Namun demikian pada tanggal 29 Agustus Rahman menyatakan bahwa hari Federasi akan diumumkan pada tanggal 16 September 1983, walaupun pada tanggal 14 September PBB telah menyampaikan hasilnya yaitu bahwa rakyat Sabah dan Kalimantan Utara menghendaki bergabung dengan Malaysia, pada tanggal 16 September tersebut juga Indonesia dan Filipina memutuskan hubungan diplomatic dengan Malaysia. Konfrontasi Indonesia – Malaysia menjadi lebih tegang. Pada tanggal 26 sampai dengan 29 September 1963 Perdana Menteri Jepang Ikeda Hayato mengadakan kunjungan ke Indonesia. Dalam pertemuannya dengan Presiden Sukarno tanggal 29 September, Ikeda mendesak Presiden untuk mengambil langkah damai dalam menyelesaikan masalah Malaysia. Perkembangan lebih lanjut, bahwa pada tanggal 12 Desember 1963 Presiden Sukarno menuntut agar PBB meneliti kembali, namun ditentang oleh Rahman; keadaan semakin tegang dan prospek penyelesaiannya semakin kabur. Dengan demikian usaha Ikeda pertama ini mengalami kegagalan.

Usaha ke dua Jepang dalam penyelesaian masalah sengketa Indonesia – Malaysia dilakukan pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni 1964. Ketika Presiden Sukarno berada di Jepang dalam kunjungannya yang sering kali pada bulan Januari 1964 bersamaan dengan kehadiran Jaksa Agung Amerika Serikat Robert Kennedy. Pada tanggal 17 Januari 1964, Jaksa Agung Robert Kennedy, Presiden Sukarno, Menteri Luar Negeri Jepang Ohira Masayoshi dan Perdana Menteri Ikeda Hayato mengadakan pertemuan yang menghasilkan kesepakatan dalam untuk menyelesaikan persengketaan secara damai. Pertemuan ini tidak membawa banyak kemajuan karena para pemimpin Malaysia membawa sikap anti Indonesia dalam kampanye pemilu 25 April 1964, keadaan ini disambut oleh pernyataan Presiden Sukarno bahwa Malaysia akan dihancurkan pada akhir tahun 1964, keadaan semakin tegang. Sementara itu Filipina, karena tekanan Amerika Serikat, mengubah keputusannya dan mengadakan hubungan konsuler dengan Malaysia dan menawarkan menjadi penengah dalam sengketa Indonesia – Malaysia . kemudian menteri Luar Negeri Filipina Salvador Lopez mengusahakan pertemuan puncak di Tokyo. Pada tanggal 20 Juni 1964 berhasil diadakan pertemuan puncak antara Presiden Sukarno, Presiden Macapagal dan Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman di Tokyo. Semula diperoleh



kesepakatan untuk membentuk komisi penengah empat Negara Asia Afrika, tetapi kemudian Tengku Abdul Rahman mengajukan syarat Indonesia harus menarik pasukannya dari Kalimantan Utara dalam waktu empat pekan. Tuntutan itu menjadikan Presiden Sukarno keluar dari sidang dan pertemuan tersebut akhirnya gagal tanpa menghasilkan kesepakatan bersama. Dengan demikian usaha Jepang yang ke dua inipun gagal.

Usaha Jepang ke tiga dilakukan oleh Kawashima Sojiro sebagai utusan pemerintah cabinet Sato Eisaku (Pedana Menteri Ikeda jatuh pada bulan November 1964) yang mengadakan kunjungan kerja pada bulan April 1964. Kawashima berhasil meyakinkan baik Presiden Sukarno maupun Perdana Menteri Rahman untuk mengadakan pertemuan kembali di Tokyo. Namun setelah sampai saat yang ditentukan Presiden Sukarno tidak menghadiri pertemuan yang direncanakan, sehingga pertemuan menjadi gagal. Kali ini usaha Jepang juga tidak berhasil.

Usaha selanjutnya, Kawashima Sojiro yang memaklumi posisi Jepang yang masih tergantung kepada Amerika Serikat, Jepang mulai memikirkan suatu tema baru politik luar negerinya dengan berusaha sedapat mungkin untuk berhubungan seakrab – akrabnya dengan Negara – Negara non-Blok. Oleh karena itu Jepang memutuskan untuk ikut menghadiri Konferensi Asia – Afrika ke dua di Aljazair. Pada bulan April 1965, Kawashima yang bersamaan dengan Chou En-lai, ke Jakarta dalam rangka untuk bersama – sama menghadiri konferensi tersebut. Namun pada tanggal 19 Juni terjadi kudeta di Aljazair terhadap kekuasaan Ben Bella yang pro peking oleh Militer anti Komunis. Kemudia konferensi ditunda sampai waktu yang tak ditentukan, sementara Presiden Sukarno Nampak semakin akrab dengan Chu En-lai. Selanjutnya Kawashima berkunjung ke Indonesia dalam rangka menghadiri undangan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia yang ke 20 pada tanggal 17 Agustus 1965. Kawashima tidak menyia – nyiakan kesempatan ini untuk usaha menangani masalah sengketa Indonesia – Malaysia, namun kali ini terasa lebih sulit karena ditentang oleh kekuatan – kekuatan dalam negeri Indonesia yang dengan gigih dan optimis akan memenangkan sengketa tersebut, dan lagi Presiden Sukarno sekali lagi menyatakan dalam pidato Peringatan tersebut bahwa Malaysia akan dihancurkan leburkan, walaupun Jepang menyatakan menunda pemberian bantuan ekonominya sebesar US \$ 37 juta. Usaha Kawashima sebagai penengah



ini terhenti ketika terjadi kudeta di Indonesia oleh PKI pada tanggal 30 September 1965. Kudeta ini tidak dengan sendirinya mengakhiri konfrontasi Indonesia – Malaysia, konfrontasi ini baru berakhir pada tanggal 11 Agustus 1966 setelah ditandatangani perjanjian persahabatan Indonesia – Malaysia oleh Adam Malik dan Tun Abdul Razak, dan ternyata tanpa pihak ke tiga; walaupun sebelumnya telah diadakan pendekatan tidak resmi oleh Adam Malik, Shirahata dan Kai Fumihiko⁵⁸.

Walaupun pada akhirnya peranan penengah Jepang dalam sengketa Indonesia – Malaysia ini tidak diperlukan, namun antusias Jepang untuk melibatkan diri sebagai peranan penengah ini cukup memberikan gambaran betapa Jepang memberikan perhatian yang besar kepada Indonesia. Dan ternyata peranan penengah Jepang ini mendapat sambutan, khususnya dari Indonesia, yang berarti mencerminkan hubungan baik antara Indonesia dengan Jepang walaupun ke dua Negara memiliki garis – garis politik yang berbeda.

⁵⁸ Sumber diambil dari Masashi Nishihara, “Peran Penengah Jepang dalam Konfrontasi, 1963 – 1966”, dalam S. Ichimura dan Koentjaraningrat (ed), Indonesia Masalah dan Peristiwa Bunga Rampai, PT. Gramedia, Jakarta, 1976, hal. 57 – 96.